



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 169./PMK.07./2008
TENTANG TATA CARA
PENYALURAN HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor : 20....
Lampiran :
Kepada
Perihal : Permintaan Penyaluran
Hibah Yth. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan RI
Jln. Wahidin No. 1
Jakarta

Berdasarkan NPHD/NPPH No, tanggal 20...., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....., pada Bank dengan No. Rekening :

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini kami lampirkan:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
2. Rencana penggunaan hibah;
3. *Copy* SPM dan dokumen pendukung terkait;
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (*progress report*) dan dokumen pendukung terkait;
5. *Copy* SP2D untuk tahap sebelumnya dan dokumen pendukung terkait;
6. Laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan dana pendamping untuk tahap sebelumnya dan dokumen pendukung terkait.

Demikian, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan: Yth,

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2.(Pejabat berwenang di Kementerian/Lembaga terkait)
3. Arsip.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Gubernur/Bupati/Walikotasebagai Pengguna Dana Hibah/Penerusan Hibah/Penerusan Pinjaman sebagai Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/Naskah Perjanjian Penerusan Hibah Nomor: tanggal..... dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam DIPA-HPD Nomortanggal.....

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah tersebut di atas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran hibah Nomor tanggal.....untuk penarikan hibah tahap sebesar Rp.....

Demikian surat ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pengguna dana
Gubernur/Bupati/Walikota.....

.....

MENTERI KEUANGAN,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.07/2008
TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

TAHAP :
NPPH/NPHD : NO.....Tanggal.....
KEGIATAN :
NOMOR DPA-SKPD :
TAHUN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	NAMA KONTRAKTOR NO. & TGL KONTRAK (SPK) *	NILAI KONTRAK)*			DANA YANG TELAH DISALURKAN						DANA YANG TELAH DIBAYARKAN						SISA PENCAIRAN KESELURUHAN			KEMAJUAN (%)	KET
						TAHAP LALU YG DILAPORKAN			TOTAL KESELURUHAN			TAHAP LALU YG DILAPORKAN			TOTAL KESELURUHAN							
			Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13	14	15 = 13+14	16	17	18 = 16+17	19 = 10-16	20 = 11-17	21 = 12-18	22	23
	JUMLAH																					
	DIBULATKAN																					

.....20....
Kepala SKPD,

.....
NIP.

keterangan:

*) jika dilaksanakan oleh pihak ketiga

***) jika dipersyaratkan

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.07/2008
TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

TAHAP :
NPPH/NPHD : NO.....Tanggal.....
KEGIATAN :
NOMOR DPA-SKPD :
TAHUN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	NAMA KONTRAKTOR NO. &TGL KONTRAK (SPK))*	NILAI KONTRAK)*			RENCANA PENCAIRAN TAHAP INI			RENCANA PELAKSANAAN			KET
			Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	Hibah	Dana Pendamping)**	Jumlah	TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR	KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13
	JUMLAH											
	DIBULATKAN											

.....20....
Kepala SKPD,

.....
NIP.

keterangan:

*) jika dilaksanakan oleh pihak ketiga

***) jika dipersyaratkan

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.07/2008
TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH
DAERAH

CONTOH FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH

RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH
TAHUN :
NPPH/NPHD: NO.....Tanggal.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	NILAI (Rp.)			KETERANGAN
		HIBAH	DANA PENDAMPING)*	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
I	Sub Jumlah I				
II	Sub Jumlah I				
	Jumlah (I + II)				
	Pembulatan				

....., 20....
KEPALA SKPD

keterangan
) jika dipersyaratkan

.....
NIP.

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.07/2008
TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH
DAERAH

CONTOH FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH

RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH
TAHUN 20.... SAMPAI DENGAN TAHUN 20....
NPPH/NPHD : NO.....Tanggal

NO	KEGIATAN	20....		20....)**		TOTAL PENGGUNAAN DANA		
		HIBAH	DANA PENDAMPING)*	HIBAH	DANA PENDAMPING)*	HIBAH	DANA PENDAMPING)*	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 = 3+5	8 = 4+6	9 = 7+8
	JUMLAH							

....., 20....
KEPALA SKPD

.....
NIP.

keterangan

*) jika dipersyaratkan

***) dijabarkan per tahun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan (20X0,20X1,20X2, ...dst)

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI